

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada tahun 2025, di bawah rezim kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berada pada persimpangan penting dalam upayanya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dalam situasi yang demikian, Indonesia tengah mengimplementasikan kebijakan nasional kontroversial bertajuk “Efisiensi Anggaran” secara masif dan menyeluruh. Kebijakan ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor pemerintahan, yang secara simultan harus menyesuaikan diri dengan pemangkasan alokasi fiskal yang tidak sedikit. Ironisnya, sebagaimana hasil siaran pers yang dipublikasikan oleh Setpres, (2025) bahwa langkah efisiensi ini berjalan beriringan dengan ambisi besar Presiden Prabowo untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai angka 8% pada tahun 2029, sebuah sasaran yang dinilai sangat ambisius di tengah tekanan struktural fiskal yang ada.

Berdasarkan dokumen resmi Indonesia, (2025) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang diundangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan mobilisasi investasi yang sangat masif dengan nilai kumulatif sebesar Rp47.573 triliun selama kurun lima tahun. Jika dirata-ratakan, kebutuhan investasinya mencapai Rp9.514 triliun per tahun. Namun yang lebih mencengangkan, sebagaimana data yang ditunjukkan oleh **Gambar 1.1** pemerintah memproyeksikan bahwa porsi investasi terbesar justru tidak datang dari negara, melainkan dari sektor non-negara, yaitu masyarakat dan pihak swasta, dengan target kontribusi sebesar Rp41.223 triliun atau setara dengan 87% dari total kebutuhan investasi nasional. Sementara itu, kontribusi negara secara langsung dibatasi hanya sebesar 7% atau Rp3.435 triliun, dan sisanya sebesar 6% atau Rp2.915 triliun diharapkan berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Muhamad, 2025). Ketimpangan porsi kontribusi ini menunjukkan bahwa negara cenderung mengambil posisi sebagai fasilitator alih-alih aktor utama dalam pembangunan ekonomi ke depan, sekaligus mempertegas arah pembangunan berbasis partisipasi

publik yang sarat risiko apabila tidak diimbangi dengan regulasi yang kokoh dan infrastruktur fiskal yang tangguh.



Gambar 1.1 Sektor Target Investasi

Sumber: Databoks.com

Kenyataan selama perjalanan pada tahun 2025, denyut perekonomian nasional justru menunjukkan gejala kelemahan struktural. Hal ini terlihat jelas dalam laporan APBN KiTa edisi Februari 2025, yang mengungkapkan bahwa per 31 Januari 2025, realisasi pendapatan negara anjlok drastis sebesar 28,3% menjadi hanya Rp157,32 triliun. Penurunan ini sebagian besar dipicu oleh ambruknya penerimaan perpajakan, yang tergerus hingga 34,5% dan hanya mencapai Rp115,18 triliun. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan penurunan kapasitas fiskal negara, namun juga menandakan melemahnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk berkontribusi secara fiskal.

Kebijakan efisiensi anggaran menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat terus-menerus ditopang melalui ekspansi fiskal yang bertumpu pada pemerintah pusat. Keadaan tersebut menuntut hadirnya pendekatan yang lebih adaptif termasuk melalui pemanfaatan kemajuan teknologi dalam tata kelola publik. Teknologi tidak lagi memadai apabila hanya diposisikan sebagai perangkat administratif, melainkan perlu dibaca sebagai instrumen yang berpotensi memperkuat transparansi, akuntabilitas, keterlacakan transaksi, serta efisiensi koordinasi dalam pengelolaan sumber daya publik. Dalam hubungan tersebut, *blockchain* memiliki relevansi yang

semakin kuat, terutama karena karakteristik teknologinya memungkinkan pembentukan mekanisme pencatatan dan verifikasi yang lebih terbuka, aman, dan terdesentralisasi. *Blockchain* sendiri merupakan suatu teknologi sistem pencatatan dan pertukaran data digital yang memungkinkan transaksi dilakukan secara aman, transparan, dan terdesentralisasi tanpa bergantung pada satu lembaga pusat (Lakhani, 2017). Dengan menggunakan mekanisme konsensus bersama, setiap data atau transaksi yang tercatat dalam *blockchain* akan diverifikasi oleh banyak pihak, sehingga sulit dimanipulasi. Beberapa karakteristik utama *blockchain* seperti keterbukaan, keamanan data, efisiensi, dan transparansi, menjadikan teknologi ini semakin banyak dikembangkan dalam berbagai sektor, mulai dari keuangan, logistik, hingga tata kelola pemerintahan. Di sisi lain, *blockchain* juga memiliki potensi untuk memperkuat praktik desentralisasi fiskal, dengan mendorong akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan investasi dan keuangan di tingkat daerah.

Pembahasan mengenai *blockchain*, investasi alternatif, dan desentralisasi fiskal, bagaimanapun, masih berkembang secara tersebar dalam rumpun kajian yang berbeda. Literatur mengenai *blockchain* umumnya berangkat dari inovasi teknologi digital dan sistem informasi; desentralisasi fiskal lebih banyak dibahas dalam ranah kebijakan keuangan publik dan hubungan fiskal antarpemerintahan; sedangkan investasi alternatif kerap dipahami dalam spektrum pendanaan yang tidak selalu diarahkan pada kebutuhan sektor publik. Keadaan tersebut menyebabkan keterkaitan antara karakteristik *blockchain*, bentuk investasi alternatif yang relevan, dan penguatan desentralisasi fiskal belum terbaca secara utuh dalam satu konstruksi pembahasan yang terpadu. Korpus kajian yang tersedia juga menunjukkan bahwa medan pengetahuan mengenai tema tersebut masih bersifat multidisipliner, sedang bertumbuh, dan belum sepenuhnya terkonsolidasi ke dalam satu arus akademik tunggal. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan yang mampu menelusuri, menyeleksi, dan mensintesis temuan-temuan ilmiah yang masih tersebar agar hubungan antarkonsep tersebut dapat dijelaskan secara lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Atas dasar kebutuhan tersebut, pendekatan *Systematic Literature Review* digunakan untuk menghimpun dan merajut berbagai temuan ilmiah yang tersebar menjadi kerangka analisis yang lebih utuh mengenai posisi *blockchain* dalam penguatan investasi alternatif guna mendukung desentralisasi fiskal di Indonesia. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menghasilkan pembacaan yang tidak berhenti pada optimisme teknologi, melainkan bergerak menuju sintesis konseptual mengenai bentuk pemanfaatan *blockchain* yang relevan, layak, dan selaras dengan kebutuhan tata kelola fiskal. Atas dasar itulah penelitian ini mengangkat judul **“Systematic Literature Review: Potensi Penggunaan Teknologi Blockchain sebagai Penguatan Investasi Alternatif Guna Mendukung Desentralisasi Fiskal di Indonesia.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dalam sub-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan karakteristik teknologi *blockchain* yang teridentifikasi dalam korpus *systematic literature review* relevan bagi penguatan desentralisasi fiskal di Indonesia?
2. Bentuk investasi alternatif apa saja yang mampu diidentifikasi dalam korpus *systematic literature review*, dan bagaimana relevansinya dengan pemanfaatan teknologi *blockchain* untuk mendukung desentralisasi fiskal di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis peran dan karakteristik teknologi *blockchain* yang teridentifikasi dalam korpus *systematic literature review* yang relevan bagi penguatan desentralisasi fiskal di Indonesia.
2. Mengidentifikasi bentuk investasi alternatif yang terungkap dalam korpus *systematic literature review* serta menganalisis relevansinya dengan pemanfaatan teknologi *blockchain* untuk mendukung desentralisasi fiskal di Indonesia.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dalam ranah akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan keterhubungan antara inovasi teknologi, tata kelola fiskal, dan desentralisasi fiskal. Melalui pendekatan *Systematic Literature Review*, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pembacaan konseptual mengenai peran dan karakteristik *blockchain* dalam konteks tata kelola publik, sekaligus menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk investasi alternatif dipahami dalam korpus kajian yang relevan. Hasil penelitian ini juga diharapkan memperluas ruang dialog akademik lintas bidang antara akuntansi sektor publik, kebijakan fiskal, dan transformasi digital pemerintahan.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan konseptual bagi pemerintah, khususnya dalam membaca potensi pemanfaatan *blockchain* sebagai penguat tata kelola fiskal yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memperjelas bentuk-bentuk investasi alternatif yang secara konseptual relevan untuk dikaitkan dengan kebutuhan penguatan desentralisasi fiskal, sehingga dapat menjadi dasar pemikiran awal bagi pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan selaras dengan kebutuhan kelembagaan publik.

#### b. Bagi Institusi Pendidikan dan Penelitian (Akademisi)

Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi sivitas akademika dalam mengembangkan kajian multidisiplin yang menghubungkan akuntansi sektor publik, teknologi informasi, dan kebijakan fiskal. Pendekatan *Systematic literature review* dalam konteks *blockchain* membuka ruang eksplorasi metodologis baru yang dapat direplikasi, diperluas, atau dikritisi oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi mendorong

lahirnya wacana-wacana baru dalam integrasi teknologi digital terhadap pengelolaan fiskal berbasis desentralisasi.

## **1.5 Batasan Penelitian**

### **1.5.1 Fokus Penelitian**

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai peran dan karakteristik *blockchain* yang teridentifikasi dalam korpus *Systematic Literature Review* serta keterkaitannya dengan penguatan desentralisasi fiskal di Indonesia. Penelitian ini juga dibatasi pada identifikasi bentuk-bentuk investasi alternatif yang muncul dalam korpus literatur dan relevansinya dalam konteks tata kelola fiskal sektor publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak diarahkan untuk menilai satu *platform*, aplikasi, atau instrumen *blockchain* tertentu secara teknis-operasional, melainkan untuk menyusun simpulan konseptual berdasarkan pola-pola temuan ilmiah yang saling berkaitan.

### **1.5.2 Keterbatasan Sumber Data Primer**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang seluruhnya bersumber dari artikel ilmiah, prosiding, dan dokumen akademik yang terpilih melalui prosedur *Systematic Literature Review*. Penelitian ini tidak menggunakan data primer, seperti wawancara, observasi lapangan, atau survei, sehingga hasil penelitian merefleksikan sintesis atas literatur yang dikaji dan bukan pengukuran empiris langsung terhadap praktik implementasi di lapangan.

### **1.5.3 Cakupan Keluaran Penelitian**

Penelitian ini tidak ditujukan untuk menyusun legal drafting, merumuskan desain kebijakan teknis secara rinci, atau menetapkan model implementasi yang siap diterapkan secara langsung. Keluaran penelitian dibatasi pada penyusunan penjelasan konseptual mengenai relevansi *blockchain* dan bentuk investasi alternatif dalam mendukung penguatan desentralisasi fiskal, sebagaimana terbaca dari sintesis temuan-temuan ilmiah yang tersedia.